

BAB IV ANALISIS

A. Proses Rekrutmen Kader Politik PDI Perjuangan Kabupaten Sidoarjo	55
B. Proses Rekrutmen Pejabat Negara Dalam Pandangan Fiqh Siyasah	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran-saran	62
C. Daftar Pustaka	63

LAMPIRAN

ن	Nun	n	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ya

1. Vokal tunggal atau *Monoftong* bahasa Arab yang lambangnya hanya berupa tanda atau harakat, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf sebagai berikut :
 - a. Tanda *fathah* (◌َ) dilambangkan dengan huruf : a, misalnya ; *hadd*
 - b. Tanda *kasrah* (◌ِ) dilambangkan dengan huruf : i, misalnya ; *jilid*,
 - c. Tanda *dhammah* (◌ُ) dilambangkan dengan huruf : u, misalnya ; *hudūd*
2. Vokal rangkap atau *diftong* bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut :
 - a. Vokal rangkap (اُو) dilambangkan dengan gabungan huruf : au.
 - b. Vokal rangkap (اِي) dilambangkan dengan gabungan huruf : ai.
3. Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa *harakat* dan huruf, transliterasinya dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horizontal) di atasnya, misalnya : *Siyasah*
4. Syaddah dan tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan *š* huruf yang bertanda *syaddah* itu.
5. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lām, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sesuai dengan bunyinya dan ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda sempang sebagai penghubung.
6. *Tā' marbūtah* mati atau yang dibaca seperti ber *harakat sukun*, dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf "h", sedangkan *tā' marbutāh* yang hidup dilambangkan dengan huruf "t",
7. Tanda apostrof (') sebagai transliterasi huruf *hamzah* hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata. Sedangkan di awal kata, huruf *hamzah* tidak dilambangkan dengan sesuatu pun.

menjadi 4 tahapan, yaitu Penarikan (rekrutmen) dimana dalam proses ini di PDI P dikenal dengan rekrutmen kader politik pola terbuka dan tertutup, Proses seleksi, Pendidikan politik, dan Pengembangan. Untuk di PDI Perjuangan sendiri, sistem rekrutmen yang digunakan dalam mencari anggota baru adalah dengan menggunakan sistem kegunaan (*merit system*). Rekrutmen dengan menggunakan *meritt system* bertujuan untuk mencari orang-orang yang benar-benar memiliki potensilah yang nantinya akan dipilih. Sehingga nantinya tidak lagi terjadi praktek-praktek nepotisme yang akan memicu konflik di dalam partai.

Sedangkan yang terjadi didalam proses rekrutmen kader politik dalam jabatan publik di PDI Perjuangan di Kabupaten Sidoarjo dikenal dengan rekrutmen antusiasme dan rekrutmen penunjukan dimana dalam proses ini yang BADIKLATlah yang berperan dalam menseleksi calon kader.

Bagaimanapun juga, rekrutmen harus didasarkan atas persamaan nilai-nilai budaya politik antara yang merekrut dan yang direkrut. Pihak yang merekrut hanyalah akan merekrut orang-orang yang dianggap mempunyai kemampuan untuk mempertahankan nilai-nilai dan ideologi yang dianut sama dan sejalan. Di sini terlihat pentingnya proses kaderisasi. Yang akan menghasilkan elit yang bertanggung jawab. Agar semakin berkualitas kader yang dimajukan, sangat besar kemungkinannya menghasilkan kinerja yang bagus pula. Ditambah dengan besarnya ongkos politik yang harus dikeluarkan, akan semakin jauh pula sang calon melakukan korupsi bila sudah mengisi jabatan-jabatan publik tersebut.

Kasus-kasus kepala/wakil kepala daerah yang tersangkut korupsi ketika menjabat, patut diduga merupakan upaya untuk mengembalikan ongkos politik yang telah dikeluarkan selama pemilukada sejak mencalonkan hingga masa kampanye.

Oleh karena itu, untuk meminimalkan munculnya orang-orang yang tidak berkualitas untuk duduk di jabatan-jabatan publik, parpol harus memperbaiki sistem rekrutmen politiknya yang sudah berjalan selama ini. Harus ada kemauan politik dari para pemimpin parpol untuk merombak total sistem rekrutmen politik sehingga pada saatnya nanti telah tersedia kader-kader parpol yang memiliki kemampuan untuk mengisi jabatan-jabatan politik itu.

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas dimana pentingnya fungsi kaderisasi politik yang terdapat dalam pasal 11 tentang fungsi partai politik maka penulis mengangkat permasalahan ini sebagai skripsi yang berjudul “Rekrutmen Kader Politik dalam Jabatan Publik di PDI Perjuangan Kabupaten Sidoarjo Menurut pasal 11 UU No.2 Tahun 2008 ditinjau dari Fiqh Siyāsah”.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, terdapat beberapa pembatasan yang dapat dijadikan suatu pijakan objek penelitian agar peneliti lebih jeli dalam membahas masalah tersebut. Maka dalam studi ini akan diidentifikasi ke dalam beberapa masalah yaitu:

1. Bagaimana UU. No.2 Tahun 2008 tentang partai politik mengatur tentang proses rekrutmen kader politik dalam jabatan publik.

oleh peneliti sebelumnya yang dapat memudahkan proses pengerjaan skripsi ini, yang pada intinya untuk memperoleh gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian lain sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sehingga tidak ada pengulangan adapun penelitian ini pernah diteliti oleh:

1. Sakinah binti Ibrahim, Mahasiswa IAIN Sunan Ampel, Jurusan Muamalah Jinayah, pada Tahun 1999 dengan judul “*Kedudukan Ahl al-Ḥall wa al- Aq’d dalam Ketatanegaraan Islam*” yang membahas kedudukan dan fungsi *Ahl al-Ḥall wa al- Aq’d* dalam Negara Islam.
2. Taufik Setiono, Mahasiswa IAIN Sunan Ampel, Jurusan Siyasah Jinayah, pada Tahun 2009, dengan judul “*Rekrutmen CALEG Menurut pasal 7 point (e) UU. No. 31 Tahun 2002 dan UU. No. 12 Tahun 2003 dalam Prespektif Fiqh Siyasah*” yang hanya membahas rekrutmen calon anggota legislatif. Sedangkan dalam penelitian ini penulis akan membahas proses rekrutmen kader politik jabatan publik baik eksekutif, maupun legislatif dan Yang terdapat dalam pasal 11 UU. No. 2 Tahun 2008, ditinjau dari Fiqh Siyasah.
3. Azmil Muqarrom, Mahasiswa IAIN Sunan Ampel, Jurusan Siyasah Jinayah, pada Tahun 2009, dengan judul “*tinjauan fiqh siyasah terhadap mekanisme fit and propertest oleh DPR RI dalam pengangkatan pejabat publik studi analisis UU No.22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD dan keputusan DPR RI No. 08/DPR RI/2005 tentang tata tertib DPR RI.*

dengan negara lain, yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.¹⁸

Rekrutmen: merupakan sebuah proses penjaringan yang terdapat dalam fungsi politik bagi partai politik untuk melakukan proses penempatan orang-orang tertentu dalam jabatan politik.¹⁹

Kader Politik: seseorang yang dipersiapkan oleh salah satu partai politik yang memiliki kemampuan yang telah teruji dan berkompeten terhadap partai, yang siap mengisi jabatan publik.²⁰

Jabatan publik: suatu posisi di internal partai dalam lingkungan DPD, DPC, PAC, Ranting atau jabatan eksekutif maupun legislatif yang dipercayakan untuk mewakili masyarakat.

I. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dihimpun merupakan data-data yang berkaitan dengan prosedur rekrutmen kader politik dalam jabatan publik di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sidoarjo menurut UU. No.2 Tahun 2008.

¹⁸ Amir Widodo, *Fiqh Siyasah*, (Yogyakarta:PT Tiara Wacana Yogya, 1994) ,1

¹⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*,(Jakarta: Gramedia, 1998), 45

²⁰ Pepy, Wawancara, Surabaya (12 mei 2011)

2. Sumber Data

- a. Sumber Primer, sumber data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian serta menjadi rujukan utama dalam penyusunan skripsi:
 - i. Piagam perjuangan dan hasta prasetya kader politik PDI Perjuangan
 - ii. Diperoleh langsung dari lapangan atau kantor pusat PDI Perjuangan propinsi Jawa Timur dengan proses berupa dokumen/ arsip/ AD-ART partai / wawancara dan buku-buku
- b. Sumber data sekunder, berupa sumber data pendukung yang terdiri dari buku-buku tentang politik dan partai politik diantaranya adalah:
 - i. Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*
 - ii. Imam Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah*
 - iii. Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*.
 - iv. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*,
 - v. Waryono Abdul Ghafur, *Tafsir Sosial*.
 - vi. Abul A'la al-Maududi, *Sistem Politik Islam*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka dan lapangan yaitu meneliti sumber-sumber pustaka dan berupa dokumen/ arsip/ AD-ART partai / wawancara dan buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini, dan sekarang banyak dilakukan penelusuran

bahan hukum tersebut melalui media internet .Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode antara lain:

- a. **Reading**, yaitu dengan membaca dan mempelajari literatur-literatur yang berkenaan dengan tema penelitian.
- b. **Writing**, yaitu mencatat data yang berkenaan dengan penelitian.
- c. **Interview**, yaitu bertanya kepada nara sumber mengenai data yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data

- a. **Editing**, yaitu memeriksa kembali kembali semua data yang telah di dapat dari DPW Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Jawa timur, khususnya data yang terkait proses rekrutmen kader politik dalam jabatan publik yang ada di Kabupaten Sidoarjo, terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara satu dengan yang lainnya.
- b. **Organizing**, Mengatur dan menyusun data yang tersebut sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan bahan untuk laporan penelitian dengan baik dan sistematis.
- c. **Analyzing**, yaitu melakukan analisa tinjauan terhadap hasil pengorganisasian data tentang rekrutmen kader politik di DPW Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), dengan

Demokrasi Indonesia Perjuangan di Indonesia dan Proses rekrutmen kader politik dalam jabatan publik di PDI Perjuangan Kabupaten Sidoarjo.

Bab IV : Berisi tentang analisis terhadap rekrutmen kader politik dalam jabatan publik di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sidoarjo. serta pandangan hukum islam terhadap rekrutmen kader politik dalam jabatan publik di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sidoarjo menurut pasal 11 UU. No.2 Tahun 2008

Bab V : Bab terakhir atau penutup dari keseluruhan pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

engkau tidur, dan demi Allah jangan engkau habiskan tiga hari ini dengan banyak tidur.” Yakni tiga malam. Ketika orang-orang melaksanakan shalat subuh, sempurnalah dilangsungkan bait kepada Utsman. Maka dengan baiat kaum muslim itu, Utsman menjadi Khalifah, bukan dengan penetapan Umar kepada enam orang.

Kemudian Utsman terbunuh. Lalu mayoritas kaum muslim di Madinah dan Kufah membaiat ‘Ali bin Abi Thalib. Maka dengan baiat kaum muslim itu, Ali menjadi seorang Khalifah.

Dengan meneliti tata cara pembaiatan mereka radhiyaLlâh ‘anhum—jelaslah bahwa orang-orang yang dicalonkan itu diumumkan kepada masyarakat. Dan jelas pula bahwa syarat in’iqad terpenuhi dalam diri masing-masing dari mereka. Kemudian diambil pendapat dari ahl al-halli wa al-’aqdi diantara kaum muslim, yaitu mereka yang merepresentasikan umat. Mereka yang dicalonkan itu dikenal luas pada masa Khulafa’ur Rasyidin, karena mereka adalah para sahabat radhiyaLlâh ‘anhum atau penduduk Madinah. Siapa yang dikehendaki oleh para sahabat atau mayoritas para sahabat, maka orang itu dibaiat dengan baiat in’iqad dan dengan itu ia menjadi Khalifah dan kaum muslim menjadi wajib untuk mentaatinya. Lalu kaum muslim secara umum membaiatnya dengan baiat taat. Demikianlah terwujud Khalifah dan ia menjadi wakil umat dalam menjalankan pemerintahan dan kekuasaan.

tanggung jawab seluruh rakyat. PDI Perjuangan sebagai sarana perjuangan dan kekuatan politik rakyat berdasarkan Pancasila sebagaimana yang terdapat dalam pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sesuai jiwa dan semangat lahirnya pada 1 Juni 1945. Di dalam perwujudannya PDI Perjuangan mempunyai jati diri kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial dengan sifat yang demokratis, merdeka, pantang menyerah dan terbuka yang seluruhnya merupakan dasar pejuangan untuk membangun bangsa dan karakter bangsa serta menggerakkan kekuatan dan memperjuangkan aspirasi rakyat untuk menjadi sebuah kebijakan Negara.

2. Misi PDI Perjuangan

PDI Perjuangan mempunyai tugas mempertahankan dan mewujudkan cita-cita Negara, mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta mempersiapkan kader bangsa. Oleh karena itu, melalui kekuatan dan kekuasaan politik yang senantiasa akan diperjuangkan, PDI Perjuangan bertekad untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang bebas, merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan visi dan misi yang tertulis di atas. PDI Perjuangan merupakan partai yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang adil dan makmur.

1. Metode Indoor yaitu proses kaderisasi yang dilakukan di dalam ruangan dimana setiap kader dilatih cara-cara memecahkan suatu masalah, memimpin rapat, seminar dan lain-lain
2. Metode Outdoor yaitu proses kaderisasi yang dilakukan di lapangan, proses ini melatih agar setiap kader mampu bersosialisasi dengan masyarakat, menyampaikan visi dan misi partai kepada masyarakat luas, dan menjadi duta partai dalam berbagai bidang.

Ketika selesai pada dua tahap kaderisasi tersebut maka akan diadakan suatu evaluasi yang berfungsi untuk mengetahui sejauh mana para kader memahami partai dan yang paling utama adalah memantau apakah kader yang dipersiapkan benar-benar memenuhi kriteria partai dan undang-undang untuk dijadikan sebagai calon pemegang jabatan atau sebagai pejabat publik. Adapun pertimbangan syarat yang dijadikan tolok ukur untuk menjadi kader politik dalam jabatan publik.

Adapun kendala yang membuat proses rekrutmen di dalam PDI P Kabupaten Sidoarjo tidak dapat memenuhi kuota yang ditetapkan oleh Undang-undang dimana dalam Pasal 1 dan 2 UU No.2 Tahun 2008 tentang partai politik menyatakan

1. Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaris.

Proses rekrutmen dari partai politik tidak akan lepas dari dua sisi proses, yaitu; menyusun kriteria yang akan menjadi kualifikasi untuk melakukan rekrutmen dan bagaimana mekanisme rekrutmen yang akan dilakukan. Kriteria atau kualifikasi yang dapat ditentukan untuk menentukan rekrutmen kader politik adalah standar minimum yang harus dimiliki oleh seorang untuk dapat dicalonkan. Kriteria atau kualifikasi disusun berbentuk aturan atau persyaratan. setidaknya ada dua kualifikasi yang seharusnya dapat dipenuhi, yaitu kualifikasi yang ditetapkan oleh negara melalui undang-undang dan kualifikasi yang ditetapkan oleh partai politik. Kualifikasi yang ditetapkan oleh negara biasanya bersifat umum, longgar dan berkaitan dengan permasalahan ideologi kebangsaan. Sedangkan kualifikasi yang ditetapkan oleh partai politik adalah menetapkan sejumlah persyaratan lain. Persyaratan tersebut selain merujuk pada ideologi partai, juga harus berkorelasi dengan pelaksanaan fungsi dari jabatan yang hendak di pegang.

Rekrutmen politik yang di mana harus melewati mekanisme yang terbuka untuk umum, dalam arti sejauhmana orang yang akan di rekrut itu mempunyai sebuah kemampuan dan pengetahuan. Dan rekrutmen itu sendiri harus dapat dipertanggung jawabkan di hadapan pada masyarakat banyak atau anggota partai itu sendiri, karena untuk mengetahui sejauhmana kualitas para anggota yang telah di rekrut. Selain itu dalam proses rekrutmen tersebut undang-undang juga menuntut adanya peran kesetaraan gender dalam pemenuhan para anggota yang akan di dudukkan pada jabatan publik.

Untuk PDI Perjuangan Kabupaten Sidoarjo, sistem rekrutmen dalam mencari anggota baru adalah dengan menggunakan sistem potensi dimana sistem ini benar-benar mencari orang-orang yang berpotensi yang nantinya akan di jadikan pengisi dalam jabatan publik pada saat pemilihan umum. Dengan kata lain penerapan dari proses rekrutmen kader yang dilakukan oleh PDI Perjuangan adalah rekrutmen yang memperhatikan usulan dari tingkat bawah dimana pada saat ini proses rekrutmen menjadi kewenangan PAC, proses ini dilakukan karena agar kader yang akan dipersiapkan sebagai pejabat publik memiliki kedekatan dan peka terhadap masalah dari masyarakat sekitar.

Dilihat dari segi UU No. 2 tahun 2008 tentang partai politik, PDI Perjuangan sudah melaksanakan proses rekrutmen dengan baik. Hal ini dapat diketahui dari proses rekrutmen yang dilakukan oleh PDI Perjuangan Kabupaten Sidoarjo dimana proses rekrutmen yang digunakan melalui proses penunjukan dan antusiasme.

Proses rekrutmen dengan cara antusiasme ini memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk menjadi anggota partai politik, hal ini sejalan dengan UU No. 2 tahun 2008 tentang partai politik yang menyatakan bahwa rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

dilakukan oleh PDI Perjuangan Kabupaten Sidoarjo telah memenuhi kriteria dimana dalam proses rekrutmen kader politik untuk jabatan publik menggunakan Proses rekrutmen dengan cara antusiasme ini memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk menjadi anggota partai politik dimana proses ini telah sesuai dengan apa yang di tentukan oleh pemerintah dalam aturan yang di berlakukan,

dan proses rekrutmen dan kaderisasi yang di lakukan oleh PDI Perjuangan Kabupten Sidoarjo menggunakan proses rekrutmen melalui penunjukan yaitu pencarian kader dilakukan langsung oleh partai melalui utusan-utusan yang di dalam PDI Perjuangan disebut BADIKLAT , yang bertugas menentukan kelompok sasaran yang akan direkrut menjadi anggota, hal ini sesuai dengan dengan pembajatan yang dilakukan oleh dewan pemilih (ahl al-ikhtiyar) atau *Ahl al-Hall wa al- Aq'd*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abul A'la al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, Bandung, Mizan;1995
- A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, Jakarata, Prenada Media Group; 2003
- A. Bakir Ihsan, *Etika dan Logika Politik*, Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2009
- Amir Widodo, *Fiqh Siyasah*, Yogyakarta, PT Tiara Wacana Yogya, 1994
- Arif Zulkifli, *Pdi Di Mata Golongan Menengah Indonesia*, Jakarta: Putaka Utama Grafiti, 1996
- Bahtiar Efendi, *Teologi Baru Politik Islam*, Yogyakarta: Galang Press, 2001
- Imam Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthoniyah*, alih bahasa, M. Yusuf Musa, *Politik dan Negara Dalam Islam*, Pustaka LSI, Yogyakarta, 1991
- Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah; Etika Politik Islam*, Surabaya, Risalah Gusti,1998
- Kuntowijoyo, "*Agama dan Demokrasi Diindonesia*", dalam Reza Noer Arfani. *Demokrasi Indonesia Kontemporer*, cet. I Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Maskuri Abdillah, *Demokrasi Dipersimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Demokrasi (1966-1993)*,cet. I Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999
- Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: UI-Press, 1993
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Jakarta*, Gaya Media Pratama, 2001

